



Beberapa Provinsi Menunda Pelantikan Penjabat

Tak sesuai dengan yang diusulkan, gubernur di beberapa provinsi menunda pelantikan pejabat wali kota/bupati. Mereka mempertanyakan sikap Kemendagri.

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Dalam Negeri, lewat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, menunjuk 43 pejabat kepala daerah untuk menggantikan wali kota/bupati yang berakhir masa jabatan mereka pada Minggu (22/5/2022). Namun, masalahnya, tidak semua pemerintah provinsi bersedia melantik pejabat kepala daerah yang telah ditunjuk itu.

Pemprov Sulawesi Tenggara, salah satunya, memilih menunda pelantikan karena dua dari tiga pejabat bupati yang ditunjuk tak sesuai dengan usulan yang diajukan. Pemprov Maluku Utara juga belum dapat memastikan pelantikan karena pejabat yang ditunjuk tak sesuai dengan yang diusulkan.

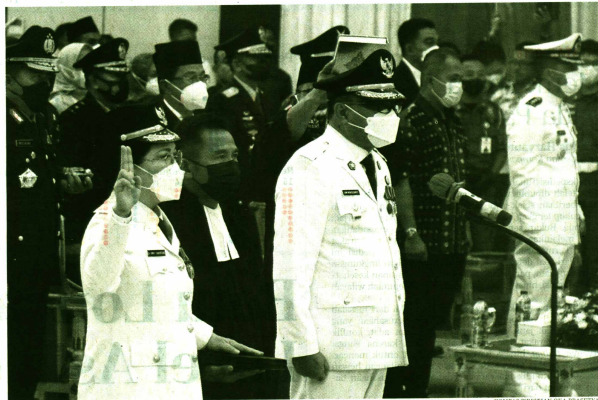
Gubernur Sultra Ali Mazi, di Baubau, Sultra, Minggu (22/5), mengatakan, hanya penunjukan Pejabat Bupati Buton Tengah yang sesuai usulannya, yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sultra M Yusuf. Untuk pejabat bupati di Muna Barat dan Buton Selatan yang ditunjuk Kemendagri tak sesuai usulannya, masing-masing adalah Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri Bahri dan Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Budiman.

Ali mengatakan akan meminta penjelasan Kemendagri terkait penunjukan pejabat itu. Pelantikan ketiga pejabat bupati itu pun akan ditunda. Selama ini, menurut Ali, proses yang sama telah dilalui, tetapi tidak pernah memiliki hasil yang berbeda. "Kami mau tahu dasar hukumnya (penunjukan itu) apa. Apalagi, sebelumnya, kami diminta Kemendagri mengirim nama (pejabat yang ditunjukkan)," katanya.

Ali mengkritik dihubunginya oleh sejumlah pemprov, mendiskusikan pejabat yang ditunjuk Kemendagri tak sesuai usulan mereka. "Beberapa daerah melempar saya terkait hal ini. Dari Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Riau juga sama kondisinya," ucapnya.

Adapun Pemprov Maluku belum bisa memastikan pelantikan pejabat bupati Morotai. Sebelumnya, Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba menyatakan menolak melantik jika pejabat yang ditunjuk tak sesuai usulan tiga nama yang diajukan. "Besok (Senin, 23/5) akan ada pernyataan pers terkait itu," ujar Kepala Biro Humas Provinsi Maluku Bahwan K. Samba.

Adapun 43 pejabat kepala daerah yang ditunjuk kali ini terdiri dari 37 pejabat bupati



Kejaka Dinas Sosial Sulawesi Utara Riniy Tamuntuan (kiri) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara Limi Mokodompit mengagap sumpah jabatan dalam upacara pelantikan mereka sebagai pejabat Bupati Kepulauan Sangihe dan Bupati Bolaang Mongondow, di Graha Gubernuran HV Worang, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (22/5/2022). Mereka akan menjabat selama satu tahun setelah pelantikan.

dan 6 pejabat wali kota. Hingga 2023, total 271 kepala dan wakil kepala daerah berakhir masa jabatannya. Pejabat akan memimpin daerah hingga pemilihan kepala daerah serentak 2024 tuntas digelar.

SK Mendagri
Meski diwarnai penundaan pelantikan, pada Minggu (22/5), gubernur di beberapa provinsi melantik pejabat bupati/wali kota di wilayah masing-masing sesuai Surat Keputusan (SK) Mendagri Gubernur Sulawesi Utara Oly Dondokambey melantik Kepala Dinas Sosial Sulut Riniy Tamuntuan sebagai Pejabat Bupati Kepulauan Sangihe dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Limi Mokodompit sebagai Pejabat Bupati Bolaang Mongondow.

Oly mengatakan tak ada konflik dengan Kemendagri dalam proses penunjukan pejabat. "Kami kirim tiga nama (untuk tiga daerah), yang memilih Kemendagri," ujarnya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B. Laikodot melantik Kepala Biro Pemerintah-

an Setda Provinsi NTT Doris Alexander Fihli sebagai Pejabat Bupati Flores Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT sebagai Pejabat Bupati Lembata. Penunjukan kedua pejabat itu sesuai usulan yang diajukan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X melantik Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sumadi sebagai Pejabat Wali Kota Yogyakarta dan Asisten Sekda DIY Bidang Perencanaan dan Pembangunan Tri Sukiyana sebagai Pejabat Bupati Kulon Progo.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, pejabat kepala daerah diseleksi melalui proses yang hati-hati. Usulan gubernur jadi bagian proses itu, tetapi sifatnya sebagai bahan pertimbangan, bukan penentu nama

pejabat. Bagi pihak yang membutuhkan klarifikasi terkait hal ini bisa berdiskusi dengan Kemendagri sehingga mencapai kesepakatan bersama.

Benni mengakui, hingga Sabtu (21/5), ada dua dari 21 provinsi yang akan melantik pejabat kepala daerah belum mengambil SK Mendagri penunjukan pejabat, yakni Maluku dan Papua. Pada Minggu (22/5), Papua mengambil SK. Namun, Maluku belum diketahui pasti.

Menurut Benni, tersedia waktu pelantikan pejabat kepala daerah hingga 24 Mei 2022. "Jika ada provinsi yang belum melakukan pelantikan, pemerintah pusat akan mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan tidak ada kekosongan pimpinan di daerah," ujarnya.

Perbaiki kebijakan
Guru Besar Ilmu Pemerin-

tahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menilai, resistansi daerah merupakan akibat dari sikap pemerintah yang mengabaikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemerintah perlu memperbaiki aturan teknis mengenai pengisian pejabat kepala daerah yang transparan.

Pemerintah, menurut Djohermansyah, justru menerapkan pola lama yang mengabaikan prinsip demokrasi. Usulan pejabat oleh gubernur tak diketahui publik dan tidak diketahui pula penentuannya. Karena itu, menurut dia, pemerintah harus segera memperbaiki kebijakan penentuan pejabat kepala daerah, dimulai dengan membuat aturan teknis yang demokratis sesuai dengan putusan MK.

OAL/FRN/
HRS/ORCA/
NIA/REK/DEA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005